



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023-2026

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
DINAS KETENAGAKERJAAN
Jl. Dr. Sutomo No. 14 Batang

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan KaruniaNya, kami telah dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Batang Tahun 2023-2026.

Rencana Strategis ini disusun guna memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa tiap-tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyusun Rencana Strategis yang merupakan rencana kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan.

Kami menyadari Rencana Strategis ini dalam penyusunannya masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun senantiasa kami harapkan demi penyempurnaan di masa mendatang.

Akhir kata semoga rencana strategis ini dapat bermanfaat sebagaimana yang diharapkan.

Batang, Juli 2022

Kepala Dinas Ketenagakerjaan
Kabupaten Batang



SUPRPTO, S.Sos, M.Si
NIP. 19660925 199710 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	8
2.2 Sumber Daya Dinas Ketenagakerjaan.....	9
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	10
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD.....	22
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1 Identifikasi Permasalahan.....	24
3.2 Penentuan Isu-isu Strategis.....	25
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Tujuan dan Sasaran.....	26
BAB V SRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	30
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	33
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	53
BAB VIII PENUTUP	55

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kondisi SDM Berdasarkan Kepangkatan.....	9
Tabel 2.2 Pencapaian Target Pengiriman Transmigran.....	11
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Batang.....	12
Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Ketenagakerjaan Kabupate Batang.....	14
Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan	24
Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 dari Tahun 2018-2022.....	19
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Batang Tahun 2023-202	26
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan.....	31
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Batang.....	34
Tabel 7.1 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Tahun 2023-2026.....	53

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022 atau 2023, diinstruksikan bahwa Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah. Rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023-2026 disusun berpedoman pada Rancangan RPD Kabupaten Batang Tahun 2023-2026, RKP, Program strategis Nasional dan pedoman penyusunan Renstra PD yang mana akan menjadi pedoman di dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Selanjutnya dengan ini kami sampaikan matrik Tujuan dan Sasaran Rancangan Awal RPD Kabupaten Batang Tahun 2023-2026 sebagai penyempurnaan.

Dalam pembangunan nasional maupun pembangunan daerah tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting Pertama, tenaga kerja merupakan pelaku pembangunan memberikan kontribusi terhadap produk domestik bruto maupun produk domestik regional bruto, Kedua tenaga kerja sebagai anggota kelompok masyarakat yang menjadi target untuk ditingkatkan kapasitas, ketrampilan, pendapatan, dan kesejahteraannya. Hal ini selaras dengan tujuan pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di sisi lain transmigrasi juga merupakan hal penting yang menjadi bagian integral dari pembangunan nasional dalam upaya mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Penyelenggaraan transmigrasi dilaksanakan sebagai upaya untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan peran serta masyarakat, pemerataan pembangunan daerah, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa melalui persebaran penduduk yang seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta nilai budaya dan adat istiadat masyarakat sejalan dengan upaya

pembangunan daerah.

Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan dalam bidang ekonomi adalah SDM. Rendahnya kualitas SDM dapat berdampak pada rendahnya tingkat produktivitas dan tingkat partisipasi dalam dunia kerja dan dalam proses produksi. Kemajuan suatu daerah amat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya. Disamping faktor-faktor lain seperti sumber daya alam, infrastruktur dan sosial budaya serta modal dan kestabilan politik, namun sumberdaya manusia memiliki peran untuk mengelola semua komponen. Maka jika sumber daya manusia di suatu daerah berkualitas tinggi sudah dapat dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam yang ada akan maksimal dan menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat. Dan berlaku sebaliknya, jika sumber daya manusia nya rendah maka meski faktor penentu yang lain ada maka akan sulit mengembangkannya. Kondisi di Batang saat ini, rasio ketergantungan cenderung terus berkurang, belakangan ini diperkirakan akan mencapai titik terendah pada periode 2020-2030. Pada periode itu akan terdapat peluang lebih besar untuk melakukan investasi pada sumberdaya manusia guna mendorong produksi. Hal ini disebut sebagai fenomena bonus demografi. Namun perlu diketahui bahwa di satu sisi, sumber daya manusia dalam jumlah yang besar dapat mendorong ekonomi untuk tumbuh jika sebagian besar dari mereka bekerja, tetapi di sisi lain dapat menciptakan instabilitas sosial dan politik, apabila banyak yang tidak bekerja. Hal ini karena pada usia produktif tetapi tenaganya tidak dapat dimanfaatkan karena tidak terserap di pasar kerja. Struktur umur penduduk Kabupaten Batang pada Tahun 2017 masih didominasi oleh penduduk usia produktif, mencapai 69,53 persen dan terus meningkat setiap tahunnya hingga pada tahun 2021 menjadi 69,80. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk usia produktif di Kabupaten Batang menjadi sangat potensial sebagai modal dasar yang besar untuk pembangunan.

Memasuki era revolusi industri 4,0 kemajuan sebuah daerah tidak lagi ditentukan oleh kekayaan sumber daya alam, melainkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi. Oleh karena itu, yang menjadi tantangan saat ini dan ke depan adalah bagaimana meningkatkan kualitas SDM. Terlebih lagi, dengan adanya Proyek Strategis Nasional (PSN) yang berlokasi di Batang yaitu Kawasan Industri Terpadu Batang, diharapkan menjadi sebuah momentum bagi pemulih ekonomi di Kabupaten Batang yang belakangan ini mengalami pelambatan karena dampak pandemi covid -19. Terkait upaya pemanfaatan momentum tersebut, permasalahan yang dihadapi adalah kompetensi dan kapasitas SDM masyarakat Batang yang belum sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan. Oleh karena itu yang menjadi tantangan Pemerintah Kabupaten Batang adalah bagaimana pendidikan di Kabupaten Batang tidak hanya untuk mencerdaskan namun juga dapat membangun pondasi yang

kokoh untuk pengembangan kualitas tenaga kerja dan juga dapat membangun kerangka dasar kompetensi. Hal berikutnya yang berpengaruh terhadap kualitas SDM adalah derajat kesehatan. Semakin sehat kondisi suatu masyarakat, maka akan semakin mendukung proses dan dinamika pembangunan ekonomi suatu daerah semakin baik, khususnya dalam meningkatkan tingkat produktivitas.

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Batang untuk tahun 2023 - 2026 adalah :

1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022 atau 2023
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Kepala Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
22. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 07 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 7);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Batang tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 13 Seri E Nomor 7);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 3);
27. Peraturan Bupati Batang Nomor 112 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 Nomor 112);
28. Peraturan Bupati Batang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2022 Nomor 12).

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Batang tahun 2023 - 2026 ini dimaksudkan sebagai acuan dalam merencanakan dan merumuskan rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Batang pada periode 2023 - 2026. Selain itu Renstra Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Batang Tahun 2023 – 2026, dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijakan operasional bagi seluruh aparat Dinas

Ketenagakerjaan Kabupaten Batang, baik di jajaran struktural maupun fungsional dalam melaksanakan program dan kegiatan maupun tugas sehari-hari, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Batang adalah untuk mewujudkan kondisi yang diinginkan yaitu turut mendorong tercapainya sasaran pembangunan dibidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam jangka waktu 4 (empat) tahun ke depan sehingga dapat dicapai hasil yang optimal secara selaras, serasi dan seimbang, melalui keterpaduan pelaksanaan, sehingga dengan demikian semua potensi yang ada dapat didayagunakan dengan sebaik-baiknya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Batang tahun 2023 - 2026 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Batang yaitu terdiri dari :

- BAB I PENDAHULUAN terdiri dari latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.
- BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH, menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi serta Sumber daya Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Batang, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.
- BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH, menyajikan identifikasi permasalahan, telaahan, program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih serta telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, serta isu-isu strategis.
- BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, menguraikan tentang tujuan dan sasaran OPD untuk mencapai tujuan sesuai dengan Tupoksi dan arah kebijakan dalam RPD.
- BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN, menguraikan tentang Strategi dan Arah Kebijakan yang diambil OPD untuk mencapai tujuan sesuai dengan Tupoksi dan arah kebijakan dalam RPD.
- BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN, berisi Rencana Program dan Kegiatan, indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif di lingkup Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten

Batang yang akan dilaksanakan 4 (empat) tahun ke depan.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN, berisi target-target yang ingin dicapai dalam kurun waktu 4 (empat) tahun ke depan yang akan menjadi dasar penilaian keberhasilan pelaksanaan kinerja.

BAB VIII PENUTUP merupakan penutup dari dokumen rencana strategis dan harapan kepada semua pihak yang berkepentingan agar menjadikan renstra ini sebagai penunjuk arah dan pedoman untuk melaksanakan pembangunan bidang ketenagakerjaan periode 2023 - 2026.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

1. Tugas dan Fungsi Unit Kerja

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Serta Peraturan Bupati Batang Nomor 112 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan. Dinas Ketenagakerjaan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Ketenagakerjaan dan bidang transmigrasi serta dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Batang mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pelayanan umum bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- c. Penyelenggaraan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- d. Pembinaan, fasilitasi, dan pelaksanaan tugas di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- e. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- f. Fasilitasi penyelenggaraan ketransmigrasian;
- g. Pembinaan terhadap UPTD dalam lingkup Dinas Ketenagakerjaan;
- h. Penyelenggaraan ketatausahaan Dinas Ketenagakerjaan;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

2. Organisasi dan Tata Kerja

Susunan Organisasi Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Batang terdiri atas:

- 1) Kepala Dinas;
- 2) Sekretariat, membawahkan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- 3) Bidang Pelatihan, penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- 4) Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja;
- 5) UPTD
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional.

2.2. Sumber Daya Dinas Ketenagakerjaan

1. Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah SDM yang menunjang pelaksanaan tugas pada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Batang sebanyak 46 (Empat Puluh Enam) orang terdiri dari 21 (Dua Puluh Satu) orang PNS dan 25 (Dua Puluh Lima) orang Tenaga Kontrak dengan klasifikasi sebagai berikut :

a. Berdasarkan Tingkat Pendidikan :

- Pasca Sarjana : 7 orang
- Sarjana : 11 orang
- D3 : 11 orang
- SMA : 1 orang
- SMP : 1 orang

b. Berdasarkan Status Kepegawaian :

- PNS : 21 orang
- Tenaga Kontrak : 25 orang

c. Berdasarkan Kepangkatan :

Tabel 2.1

Pangkat	Golongan	Jumlah
Pembina Utama Muda	IV/c	1 Orang
Pembina Tingkat I	IV/b	1 Orang
Pembina	IV/a	1 Orang
Penata Tingkat I	III/d	7 Orang
Penata	III/c	1 Orang
Penata Muda	III/a	7 Orang
Pengatur Tk I	II/d	2 Orang
Pengatur Muda Tk I	II/b	1 Orang
Jumlah		21 Orang

Dengan kondisi kepegawaian tersebut diatas, maka masih perlu adanya tambahan pegawai terutama yang berlatar belakang pendidikan komputer, akuntansi, arsiparis maupun teknik.

a. Berdasarkan Eselon :

- Eselon II/b : 1 orang
- Eselon III/a : 2 orang

- Eselon IV/a : 8 orang
- Staf : 10 orang

Dengan kondisi tersebut diatas, maka masih ada kekosongan pada eselon III/b sebanyak 1 (satu) orang untuk mengisi jabatan Kepala Bidang pada Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Lapentatrans)

b. Penjenjangan

- 1) Diklatpim II : 1 orang
- 2) Diklatpim III : 2 orang
- 3) Diklatpim IV : 11 orang

Dengan kondisi tersebut diatas, maka masih ada pejabat yang belum mengikuti diklatpim III sebanyak 2 (dua) orang, diklatpim IV sebanyak 4 (empat) orang.

2. Kondisi Sarana

a. Inventaris Barang Tidak Bergerak.

- 1) Gedung BLK Kabupaten Batang.

b. Inventaris Barang Bergerak.

- 1) Alat Kantor : Meja, Kursi, Almari, Mesin Ketik, Komputer, dll.
- 2) Alat Angkutan : Mobil, Kendaraan roda 2.

(Daftar Inventaris sebagaimana terlampir)

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

1. Urusan Tenaga Kerja

Pelayanan urusan tenaga kerja dilaksanakan oleh 2 (dua) bidang yaitu Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi; dan Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja. Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan rekomendasi ijin operasional Lembaga Pelatihan Kerja Swasta dan melaksanakan bimbingan dan pembinaan terhadap lembaga tersebut;
- b. Memberikan layanan informasi lowongan kerja melalui Sosialisasi, website dan papan Informasi Kabupaten Batang dan DBHCT;
- c. Penyebarluasan informasi pasar kerja dengan menyelenggarakan bursa kerja yang setiap tahunnya diikuti oleh perusahaan di Kabupaten Batang dengan jumlah lowongan kerja termasuk di Luar Negeri berkisar 1000 lowongan kerja yang dilaksanakan satu tahun sekali.

2. Transmigrasi

Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi dengan indikator prosentase transmigran yang berhasil ditempatkan. Untuk banyaknya jumlah Kepala Keluarga dan jumlah Warga yang mengikuti transmigrasi ditentukan oleh pusat. Pelaksanaan program dan kegiatan ini dianggarkan dalam APBD Kabupaten Batang.

Tabel 2.2
Pencapaian Target pengiriman transmigran

NO	TAHUN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	TK CAPAIAN (%)
1	Tahun 2017	Jumlah Kepala Keluarga	5 KK	5 KK	100%
2	Tahun 2018	Jumlah Kepala Keluarga	5 KK	4 KK	80%
3	Tahun 2019	Jumlah Kepala Keluarga	5 KK	5 KK	100%
4	Tahun 2020	Jumlah Kepala Keluarga	5 KK	0 KK	0%
5	Tahun 2021	Jumlah Kepala Keluarga	5 KK	0 KK	0%

Capaian kinerja pelayanan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Batang berdasarkan Renstra periode Tahun 2017-2022, baik Pencapaian Kinerja serta Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Batang

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Angka Partisipasi Angkatan Kerja	-	-	-	390.386	396.298	402.595	408.859	415.232	388.307	406.670	402.502	416.576	430.690	99,47	102,62	99,98	101,89	103,72
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	-	-	-	68,04	68,24	68,48	68,7	68,91	67,7	70,05	68,53	69,78	71,4	99,5	102,65	100,07	101,57	103,61
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	-	-	-	4,17	3,97	3,76	3,61	3,5	5,82	4,23	4,16	6,92	6,59	139,57	106,55	110,64	191,69	188,29
4	Tingkat Kesempatan Kerja	-	-	-	95,53	94,29	94,29	94,31	94,99	94,18	95,77	95,84	93,08	93,41	98,59	101,57	101,64	98,7	98,34
5	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	-	-	-	65	70	74	80	84	153,67	82,54	69,98	86,13	86,06	236,42	117,91	94,57	107,66	102,45
6	Rasio Lulusan S1/S2/S3	-	-	-	2,5	2,58	2,65	2,72	2,79	-	2,73	8,24	7,56	8,99	0	105,81	310,94	277,94	322,22
7	Rasio Ketergantungan	-	-	-	31,77	31,27	30,7	30,74	29,55	45,13	45,02	44,99	42,39	42,39	142,05	143,97	146,55	137,9	143,45

8	Jumlah warga yang berangkat transmigrasi, Jumlah Kepala Keluarga	-	-	-	5	5	5	5	5	5	4	5	0	0	100	80	100	0	0
---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	----	-----	---	---

Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Batang

No	Uraian	Anggaran Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Pendanaan Tahun ke-				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			546.800.000	419.158.000				541.148.598	408.277.492	
	Keg. Penyediaan jasa surat menyurat			1.440.000	1.440.000				1.440.000	1.440.000	
	Keg. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			52.400.000	54.000.000				47.616.331	48.647.064	
	Keg. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional			4.800.000	4.600.000				4.701.350	2.832.250	
	Keg. Penyediaan jasa kebersihan kantor			78.300.000	81.400.000				78.300.000	81.139.948	
	Keg. Penyediaan alat tulis kantor			30.000.000	14.900.000				30.000.000	14.900.000	
	Keg. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			16.000.000	11.500.000				16.000.000	11.500.000	
	Keg. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			4.000.000	4.000.000				4.000.000	4.000.000	
	Keg. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			63.700.000					63.650.000		
	Keg. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			2.800.000	2.800.000				2.800.000	2.800.000	
	Keg. Penyediaan makanan dan minuman			20.000.000	16.668.000				19.336.000	16.642.000	

	Keg. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			90.160.000	42.000.000				90.104.917	41.981.324	
	Keg. Penyediaan jasa pengamanan kantor			128.550.000	134.400.000				128.550.000	131.009.929	
	Keg. Kegiatan Pengelolaan Keuangan SKPD			54.650.000	51.450.000				54.650.000	51.384.977	
B	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			188.541.500	1.134.300.000				188.275.950	781.408.496	
	Keg. Pembangunan Gedung Kantor				1.025.000.000					672.125.496	
	Keg. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			65.400.000	21.000.000				65.150.000	21.000.000	
	Keg. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			107.941.500	76.300.000				107.925.950	76.283.000	
	Keg. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor			15.200.000	12.000.000				15.200.000	12.000.000	
C	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			2.000.000	3.000.000				2.000.000	3.000.000	
	Keg. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			2.000.000	3.000.000				2.000.000	3.000.000	
D	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja			1.382.571.500	400.141.800				1.370.585.361	395.964.239	
	Keg. Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja			162.571.500	54.800.800				161.902.000	52.761.800	
	Keg. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan			20.000.000	9.741.000				19.850.000	9.736.700	

	Keg. Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan, Mengurangi Pengangguran dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah (DBHCT)			284.505.000	235.600.000				283.913.500	233.468.839	
	Keg. Pelatihan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau (DBHCT)			915.495.000	0				904.919.861	0	
	Penyediaan Data Base Tenaga Kerja Daerah				100.000.000					99.996.900	
E	Program Peningkatan Kesempatan Kerja			388.240.000	1.320.489.500				385.000.497	1.303.458.206	
	Keg. Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja, Job Market Fair			194.450.000	132.018.800				194.224.999	131.693.739	
	Keg. Penyiapan tenaga kerja siap pakai			112.200.000	58.470.700				111.694.698	58.340.667	
	Keg. Pemberian Fasilitas dan Mendorong Sistem Pendanaan Pelatihan Berbasis Masyarakat			81.590.000					79.080.800		
	Padat Karya				1.130.000.000					1.113.423.800	
F	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan			325.493.000	123.598.424				325.372.216	123.301.654	
	Keg. Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja			44.825.000	29.277.700				44.825.000	29.202.477	

	Keg. Fasilitas Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial			100.000.000	42.874.000				100.000.000	42.874.000	
	Keg. Fasilitas Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan			118.518.000	13.849.524				118.468.000	13.843.000	
	Keg. Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan			32.150.000	13.007.200				32.143.216	12.857.200	
	Keg. Monitoring, evaluasi dan pelaporan			30.000.000	24.590.000				29.936.000	24.524.977	
G	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi				1.000.000					1.000.000	
	Kegiatan Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi				1.000.000					1.000.000	

No	Uraian	Anggaran Perangkat Daerah Tahun ke-	Realisasi Pendanaan Tahun ke-
		2021	2021
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	2.863.239.262	2.813.950.077
	<i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	2.000.000	2.000.000
	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.000.000	2.000.000
	<i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	2.482.409.212	2.439.750.476
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.285.969.212	2.246.124.844
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	196.440.000	193.625.632
	<i>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	119.340.050	119.275.239
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.999.100	3.999.100
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.398.450	40.398.400
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.142.500	19.083.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.500.000	12.500.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.800.000	2.800.000
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40.500.000	40.494.739
	<i>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	145.000.000	139.830.962
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.440.000	1.439.900
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	49.000.000	44.033.563
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	94.560.000	94.357.499
	<i>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	114.490.000	113.093.400

	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5.000.000	3.681.400
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	77.560.000	77.482.000
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung	20.000.000	20.000.000
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11.930.000	11.930.000
B	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga dan Produktivitas Tenaga Kerja	797.054.950	792.209.066
	<i>Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</i>	<i>588.608.150</i>	<i>585.586.001</i>
	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	588.608.150	585.586.001
	<i>Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</i>	<i>10.300.000</i>	<i>10.268.000</i>
	Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	10.300.000	10.268.000
	<i>Kegiatan Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil</i>	<i>198.146.800</i>	<i>196.355.065</i>
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	198.146.800	196.355.065
C	Program Penempatan Tenaga Kerja	268.343.000	268.041.865
	<i>Kegiatan Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>268.343.000</i>	<i>268.041.865</i>
	Sub Kegiatan Pelayanan Antar Kerja	268.343.000	268.041.865
D	Program Hubungan Industrial	191.361.761	189.146.108
	<i>Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>92.417.950</i>	<i>90.401.254</i>
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	28.500.000	28.478.800

	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	63.917.950	61.922.454
	<i>Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</i>	98.943.811	98.744.854
	Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	98.943.811	98.744.854
E	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	-	-
	<i>Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasaldari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	-	-
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi	-	-

Tabel di atas menjabarkan tentang pencapaian Kinerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Batang periode Renstra Tahun 2017-2022. Pada Tahun 2021 Dinas Ketenagakerjaan memiliki 8 (delapan) indicator yang digunakan dalam pengukuran kinerja pelayanan, antara lain :

1. Angka Partisipasi Angkatan Kerja;
2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja;
3. Tingkat Pengangguran Terbuka;
4. Tingkat Kesempatan Kerja;
5. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja;
6. Rasio Lulusan S1/S2/S3;
7. Rasio Ketergantungan;
8. Jumlah warga yang berangkat transmigrasi, Jumlah Kepala Keluarga

Secara umum ke-delapan indicator pelayanan tersebut telah berhasil mencapai target yang ditetapkan, meskipun ada indicator yang belum mencapai target yang ditetapkan.Tingkat Pengangguran Terbuka Realisasi pada Tahun terakhir 2021 sebesar 6,59 adalah lebih besar dari kondisi awal sebesar 4,17 sehingga indikator ini tidak tercapai dan perlu dilakukan akselerasi di tahun 2022 serta diberikan alasan argumentatif tentang penyebab ketidak tercapaian. Pengangguran terdiri dari :

1. Penduduk yang aktif mencari pekerjaan
2. Penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/ pekerjaan baru
3. Penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan
4. Kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja

Ada banyak faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target Tingkat Pengangguran Terbuka diantaranya :

1. Pertumbuhan ekonomi
2. Upah
3. Inflasi
4. Investasi

Di luar faktor-faktor tersebut faktor yang sangat mempengaruhi TPT pada Tahun 2020 dan 2021 adalah pandemi covid 19. Terkait dengan Tupoksi Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Batang, diantara faktor-faktor yang mempengaruhi TPT adalah upah. Upah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran sehingga besar kecilnya upah yang ditetapkan oleh pemerintah sangat berpengaruh terhadap tingkat pengangguran yang ada. Setiap kenaikan tingkat upah akan diikuti oleh turunnya tenaga kerja yang diminta, yang berarti akan menyebabkan meningkatnya pengangguran. Sebaliknya, apabila tingkat upah turun maka akan diikuti oleh meningkatnya penyerapan tenaga kerja, sehingga dapat dikatakan bahwa jumlah tenaga kerja yang terserap mempunyai hubungan timbal balik dengan tingkat upah. Upah mempunyai pengaruh terhadap jumlah angkatan kerja yang ada. Sehubungan dengan itu jika upah yang ditetapkan tinggi, maka biaya produksi akan semakin meningkat. Akibatnya, perusahaan melakukan efisiensi dengan cara pengurangan tenaga kerja dan berakibat pada bertambahnya jumlah pengangguran . Dari tahun ke tahun Jumlah UMK di Kabupaten Batang selalu mengalami kenaikan sehingga otomatis mengakibatkan meningkatnya jumlah pengangguran. Jika dikaitkan dengan adanya KIT Batang, seharusnya pengangguran di Kabupaten Batang mengalami penurunan tetapi pada kenyataannya terus mengalami kenaikan. Faktor utamanya adalah pandemi covid 19. Di Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Batang melalui Dinas Ketenagakerjaan harus terus melakukan akselerasi untuk menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka diantaranya dengan upaya :

1. Membuka Lapangan Kerja
2. Meningkatkan Peredaran Modal Usaha

3. Menempatkan Pencari Kerja di Tempat yang tepat
4. Melatih para pencari kerja untuk membuat usaha sendiri
5. Memberikan penyuluhan ke masyarakat
6. Memberikan pelatihan sertifikasi ke pencari kerja
7. Perpanjang tunjangan ketenagakerjaan
8. Membuat penganekaragaman ekonomi
9. Meningkatkan transmigrasi
10. Meningkatkan mutu pendidikan

Tingkat Kesempatan Kerja, Realisasi pada tahun terakhir 2021 sebesar 93,41 adalah lebih rendah dari kondisi awal sebesar 95,53 sehingga indikator ini tidak tercapai dan perlu dilakukan akselerasi di Tahun 2022 serta diberikan alasan yang argumentatif tentang penyebab ketidak tercapaian. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja :

1. Adanya kesempatan kerja yang tersedia (demand for labor)
2. Tingkat pendidikan, pengetahuan, keahlian dan ketrampilan
3. Usia tenaga kerja dan jumlah angkatan kerja yang tersedia
4. Besarnya permintaan total masyarakat
5. Jumlah investasi yang dilakukan perseorangan dan badan usaha swasta
6. Kebijakan pajak dan kemampuan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan ketenagakerjaan

Terbukanya kesempatan kerja merupakan salah satu indikator terjadinya pembangunan ekonomi. Jika ketersediaan kesempatan kerja tidak seimbang dengan peningkatan penduduk usia kerja maka akan menimbulkan permasalahan yang disebut pengangguran. Jika dibandingkan target kinerja pada akhir periode akhir Renstra, untuk indikator Rasio Ketergantungan, capaian kinerja dianggap akan tercapai, diprediksi jumlah penduduk usia kerja menurun. Jika dibandingkan target kinerja pada akhir periode akhir Renstra, untuk indikator jumlah warga yang berangkat transmigrasi, jumlah kepala keluarga capaian kinerja dianggap tidak akan tercapai, karena pada Tahun 2022 tidak terdapat anggaran pendukung program ini dan pandemic covid-19 juga belum berakhir, sehingga Pemerintah mungkin belum memberlakukan kegiatan transmigrasi lagi.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD.

Berdasarkan analisis Renstra Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Batang, bahwa urusan tenaga kerja dan transmigrasi di Kabupaten Batang memiliki peluang yang cukup baik, hal ini dapat dilihat dari :

1. Berdirinya KITB
2. Adanya PLTU
3. Tersedianya UMKM potensial untuk dikembangkan
4. Tenaga kerja yang jumlahnya cukup besar

Dengan melihat kondisi tersebut diatas, tentunya Kabupaten Batang memiliki peluang. Namun dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari adanya tantangan yang menghadang.

Adapun tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan OPD antara lain :

1. Adanya persaingan antar daerah yang sangat kompetitif.
2. Perlu adanya pemetaan yang jelas untuk jenis pelatihan agar memenuhi kebutuhan terutama menyambut KITB
3. Komunikasi yang lebih baik dengan perusahaan
4. Informasi lowongan kerja yang akurat

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan

Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Batang merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan bidang transmigrasi serta dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Dinas Ketenagakerjaan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Batang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Ketenagakerjaan dan bidang Transmigrasi serta dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah yang dalam pelaksanaannya masih terdapat permasalahan-permasalahan pelayanan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1. Pemetaan Permasalahan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Banyaknya pengangguran	Disebabkan karena tingginya jumlah penduduk dan tidak diikuti dengan lapangan kerja yang cukup	Ketidakseimbangan laju pertumbuhan penduduk dengan lapangan kerja yang tersedia. Artinya jumlah tenaga kerja lebih banyak dari jumlah lapangan kerja
Lapangan kerja yang rendah	Selama Tahun 2017-2019, lapangan kerja di Kabupaten Batang rendah karena belum adanya KITB	Jumlah tenaga kerja lebih banyak dari jumlah lapangan kerja
Kualitas Tenaga Kerja yang rendah	Kualitas tenaga kerja yang minim, meskipun banyak lulusan S1 dan S2	Kurang jelasnya pengelolaan antara pendidikan akademik dan pendidikan vokasi
Persebaran tenaga kerja yang tidak merata	Sebagian besar tenaga kerja di Indonesia berada di Pulau Jawa, sementara di daerah lain masih kekurangan tenaga kerja, terutama untuk sector pertanian, perkebunan dan kehutanan. Dengan demikian di Pulau Jawa banyak terjadi pengangguran, semenyara di daerah lain masih banyak sumber daya alam yang belum dikelola secara maksimal. Seringkali orang dalam mencari pekerjaan memperhitungkan lokasi tempat pekerjaan. Bahkan ada sebagian masyarakat yang rela memperoleh pekerjaan seadanya yang tidak sesuai dengan kualifikasi yang dimilikinya. Sebagian besar industry terdapat di Jawa, oleh sebab itu banyak	Sebagian besar tenaga kerja di Indonesia berada di Pulau Jawa

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	masyarakat dari luar Jawa yang berbondong-bondong pergi ke Jawa untuk mencari pekerjaan	
Anggaran yang minim akibat pandemic covid 19	Minimnya jumlah anggaran di Tahun 2020 dan 2021 akibat pandemic covid 19 menyebabkan kurangnya aktivitas kegiatan. Terutama untuk anggaran kegiatan transmigrasi. Pada Tahun 2020, kegiatan transmigrasi ditiadakan secara Nasional. Pada Tahun 2021, Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Batang tidak ada anggran untuk kegiatan transmigrasi,	Kurangnya pemetaan kebutuhan anggaran
Jenis pelatihan yang kurang memenuhi pangsa pasar karena terbatasnya fasilitas	Jenis pelatihan yang ada dari tahun ke tahun hampir sama karena terbatasnya fasilitas, sehingga kurang memenuhi kebutuhan di KITB	Kurangnya pemetaan kebutuhan pelatihan yang sesuai dengan pangsa pasar, dan terbatasnya fasilitas dan peraturan yang ada

3.2. Penentuan Isu-isu Strategis

Penentuan isu-isu strategis Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Batang Tahun 2023-2026, didasarkan pada faktor-faktor pelayanan mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari:

1. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah

Isu strategis Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Batang Tahun 2023-2026, adalah sebagai berikut:

1. Tingginya tingkat pengangguran terbuka
2. Masih rendahnya penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Batang
3. Belum optimalnya jumlah Kepala Keluarga yang berangkat transmigrasi di Kabupaten Batang

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan jangka menengah Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Batang merupakan suatu kondisi yang ingin dicapai atau diwujudkan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun, yang dirumuskan dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023-2026 serta dilengkapi dengan alat ukur/indikator untuk mengetahui tingkat keberhasilannya yang akan dipertanggungjawabkan pada akhir periode perencanaan.

Sasaran jangka menengah Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Batang dirumuskan dengan memperhatikan tugas dan fungsi, kelompok sasaran yang dilayani, tujuan organisasi, permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah.

Berdasarkan analisis dan pendekatan sebagaimana tersebut diatas, maka tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Batang Tahun 2023-2026 disajikan dalam tabel, yaitu:

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Batang Tahun 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada tahun ke-			
			2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya Kersempatan Kerja		Tingkat Kesempatan Kerja	97	97	97	07
	Meningkatnya kualitas Hubungan Industrial dan Kualitas Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	30,37	31,17	32,01	32,8
Meningkatnya kualitas layanan ketenagakerjaan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di bidang ketenagakerjaan	85	85	90	90
	Meluasnya Kesempatan Kerja Bagi Masyarakat dan Meningkatkan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Prosentase Pencari pekerjaan yang mendapat pekerjaan	97	97	97	97
Meningkatkan kinerja perangkat daerah yang akuntabel dan pelayanan publik yang Cerdas, Cepat dan Responsif		SAKIP OPD	65	70	70	75
	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Cerdas, Cepat	Persentase indikator kinerja sasaran strategis	70	80	80	80

	dan Responsif	Perangkat Daerah yang mencapai target				
		Indeks Kepuasan Masyarakat OPD	85	85	90	90

85Sumber : Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Batang, Hasil Perumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2023-2026

Tujuan 1

Meningkatnya Kesempatan Kerja
 Dengan indikator : Tingkat Kesempatan Kerja

Sasaran :
Meningkatnya kualitas Hubungan Industrial dan Kualitas Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Dengan indikator :
 a. Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak
 Program :

1. Program Hubungan Industrial

Dengan indikator : Persentase Jumlah Perselisihan HI
 Kegiatan :
 a. Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan
 Dengan indikator :
 - Jumlah Perusahaan yang memiliki sarana HI
 - Jumlah Tenaga Kerja yang ikut Program BPJS

 b. Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial. Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
 Dengan indikator : Rasio Jumlah Perselisihan HI yang berhasil dilakukan mediasi

Tujuan 2

Meningkatnya kualitas layanan ketenagakerjaan
 Dengan indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di bidang ketenagakerjaan
Sasaran : Meluasnya Kesempatan Kerja Bagi Masyarakat dan Meningkatkan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
 Dengan indikator : Prosentase Pencari pekerjaan yang mendapat pekerjaan
 Program :
1. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Dengan indikator :

- a. Rasio Penduduk yang bekerja

Kegiatan :

- a. Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas Kepada Perusahaan Kecil
Dengan indikator : Jumlah Tenaga Kerja Mandiri / Wirausaha baru
- b. Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
Dengan indikator : Jumlah LPKS yang mendapatkan pembinaan
- c. Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi

2. Program Penempatan Tenaga Kerja

Dengan indikator :

Prosentase Pencari Pekerjaan yang mendapat pekerjaan

Kegiatan :

- a. Kegiatan Pelayanan Antar Kerja
Dengan indikator : Jumlah Pencari Kerja yang mendapat pelayanan AK1
- b. Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja
Dengan indikator : Jumlah Tenaga Kerja yang terserap
- c. Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
Dengan indikator : Jumlah Pencari Kerja yang memanfaatkan aplikasi Batang Career

3. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

Dengan indikator : Prosentase transmigran yang berhasil ditempatkan

Kegiatan :

- a. Kegiatan Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi
Dengan indikator : Jumlah Calon Transmigran yang mendapat pelatihan

Program :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Dengan indikator :

- Persentase ASN Disnaker yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan

Kegiatan :

- a. Kegiatan

Dengan indikator :

- persentase capaian kinerja Disnaker

- a. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Dengan indikator : Banyaknya dokumen pelaporan dinas

2. Program Perencanaan Tenaga Kerja

Dengan indikator : Persentase Kegiatan yang mengacu ke RTK

Kegiatan :

- a. Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)

Dengan indikator : Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja

Tujuan 3

Meningkatkan kinerja perangkat daerah yang akuntabel dan pelayanan publik yang Cerdas, Cepat dan Responsif

Dengan indikator : SAKIP OPD

Sasaran :

Meningkatnya Pelayanan Publik yang Cerdas, Cepat dan Responsif

Dengan indikator :

- a. Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target
- b. Indeks Kepuasan Masyarakat OPD

Program :

3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Dengan indikator :

- Persentase ASN Disnaker yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan

Kegiatan :

- b. Kegiatan

Dengan indikator :

- persentase capaian kinerja Disnaker
- b. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Dengan indikator : Banyaknya dokumen pelaporan dinas

4. Program Perencanaan Tenaga Kerja

Dengan indikator : Persentase Kegiatan yang mengacu ke RTK

Kegiatan :

- b. Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)

Dengan indikator : Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja

BAB V

SRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Perumusan pernyataan strategi Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Batang dalam empat tahun mendatang dilakukan dengan merumuskan tahapan/langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, berdasarkan:

1. Pengkajian sasaran jangka menengah periode sebelumnya dan yang akan datang;
2. Pengkajian gambaran umum pelayanan, capaian dan permasalahan pembangunan, serta isu-isu strategis pembangunan daerah;
3. Analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidak-berhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk setiap strategi yang akan dipilih.

Sedangkan perumusan arah dan kebijakan, dirumuskan dengan menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih realistis, memperjelas strategi sehingga lebih fokus (kelompok sasaran/ lokus), konkrit, dan operasional agar lebih terarah dalam mencapai target-target tujuan dan sasaran.

Tujuan dan sasaran Dinas Ketenagakerjaan mendukung tujuan no. 1 RPD yaitu **meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Batang seutuhnya melalui penguatan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan tetap memperhatikan konsep pembangunan berkelanjutan** dengan sasaran a yaitu **Meningkatnya Sumber Daya Manusia Batang yang semakin berkualitas**, dan strategi 1). Penguatan strategi kolaborasi untuk peningkatan kualitas Pendidikan, kesehatan serta peningkatan kapasitas SDM tenaga kerja 2). Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pemenuhan layanan dasar Pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat, serta sasaran c yaitu **Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang merata serta menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran**, dengan strategi 1). Meningkatkan daya beli masyarakat dengan memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan melalui pemanfaatan potensi sector unggulan, 2). Meningkatkan akses kebutuhan dasar dan meningkatkan beban pengeluaran masyarakat miskin.

Hasil perumusan strategi dan arah kebijakan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Batang dalam empat tahun mendatang, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatnya kualitas layanan ketenagakerjaan			
	Meluasnya Kesempatan Kerja Bagi Masyarakat dan Meningkatkan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Penguatan strategi kolaborasi untuk peningkatan kualitas Pendidikan, kesehatan serta peningkatan kapasitas SDM tenaga kerja	Penyelenggaraan pelatihan keterampilan bagi masyarakat pencari kerja.
		Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pemenuhan layanan dasar Pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat, serta sasaran	Sosialisasi kebijakan tentang ketenagakerjaan.
		Meningkatkan daya beli masyarakat dengan memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan melalui pemanfaatan potensi sector unggulan	
		Meningkatkan akses kebutuhan dasar dan meningkatkan beban pengeluaran masyarakat miskin.	
	Meningkatnya kualitas Hubungan Industrial dan Kualitas Jaminan Sosial Tenaga Kerja		
		Penguatan strategi kolaborasi untuk peningkatan kualitas Pendidikan, kesehatan serta peningkatan kapasitas SDM tenaga kerja	
		Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pemenuhan layanan dasar Pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat, serta sasaran	
		Meningkatkan daya beli masyarakat	

		dengan memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan melalui pemanfaatan potensi sector unggulan	
		Meningkatkan akses kebutuhan dasar dan meningkatkan beban pengeluaran masyarakat miskin.	
Meningkatkan kinerja perangkat daerah yang akuntabel dan pelayanan publik yang Cerdas, Cepat dan Responsif			
	Meningkatnya capaian kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah		
	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Cerdas, Cepat dan Responsif		

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Batang diperlukan suatu instrumen berupa rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang dirumuskan berdasarkan strategi dan arah kebijakan serta tugas dan fungsi.

Rencana program, kegiatan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Batang Tahun 2023-2026 diarahkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana susunan organisasi Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Batang. Program dan kegiatan Tahun 2023 sampai dengan 2026, adalah sebagai berikut:

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Batang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang - gung- jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun- 2		Tahun- 3		Tahun-4		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
			Program Penunja ang Urusan Pemerint ahan Daerah Kabupat en/ Kota				6.801.681.170		5.801.681.170		3.801.681.170		6.801.681.170		6.801.681.170		
				Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	98,7	98,7		98,75		98,8		98,8		98,8			
				Persentase capaian kinerja anggaran program	100	95		95		95		95		95			

				Perangkat Daerah													
				Cakupan layanan operasional kantor	98,4	98,4		98,45		98,5		98,55		98,55			
				Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	60	60		60		65		70		70			
				Persentase Administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	98,35	98,4		98,45		98,5		98,55		98,55			
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000				

			<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>														
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusun an Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000				
			<i>Kegiatan Administ rasi Keuangan Perangkat Daerah</i>				<i>3.208.993.270</i>		<i>3.208.993.270</i>		<i>3.208.993.270</i>		<i>3.208.993.270</i>				
			Sub Kegiatan Penyediaa n Gaji dan Tunjanga n ASN				2.984.393.270		2.984.393.270		2.984.393.270		2.984.393.270				
			Sub Kegiatan				224.600.000		224.600.000		224.600.000		224.600.000				

			Penyediaa n Administ rasi Pelaksana anTugas ASN														
			<i>Kegiatan Administ rasi Umum Perangkat Daerah</i>				146.328.500		146.328.500		146.328.500		146.328.500				
			Sub Kegiatan Penyediaa n Kompone n Instalasi Listrik/ Penerang an Bangunan Kantor				5.124.500		5.124.500		5.124.500		5.124.500				
			Sub Kegiatan Penyediaa n Peralatan dan Perlengka pan Kantor				28.125.200		28.125.200		28.125.200		28.125.200				

			Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor				26.550.000		26.550.000		26.550.000		26.550.000				
			Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				13.355.600		13.355.600		13.355.600		13.355.600				
			Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				2.880.000		2.880.000		2.880.000		2.880.000				
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi				70.293.200		70.293.200		70.293.200		70.293.200				

			SKPD														
			Kegiatan Penyediaa n jasa Penunjan g Urusan Pemerinta han Daerah				186.458.400		186.458.400		186.458.400		186.458.400				
			Sub Kegiatan Penyediaa n Jasa Surat Menyurat				1.875.000		1.875.000		1.875.000		1.875.000				
			Sub Kegiatan Penyediaa n Jasa Komunika si, Sumber Daya Ar dan Listrik				65.000.000		65.000.000		65.000.000		65.000.000				
			Sub Kegiatan Penyediaa n Jasa Pelayanan Umum Kantor				119.583.400		119.583.400		119.583.400		119.583.400				
			Kegiatan				149.100.440		149.100.440		149.100.440		149.100.440				

			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														
			Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan				7.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000				
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan				92.100.000		92.100.000		92.100.000		92.100.000				

			aan Pajak dan Perizinan Kendaraa n Dinas Operasion al atau Lapangan														
			Sub Kegiatan Pemelihar aan/ Rehabilita si Gedung Kantor Bangunan Lainnya				30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000				
			Sub Kegiatan Pemelihar aan Rehabilita si Sarana dan Prasarana Pendukun g Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				20.000.440		20.000.440		20.000.440		20.000.440				
			<i>Kegiatan</i>				<i>3.075.800.560</i>		<i>2.075.800.560</i>		<i>75.800.560</i>		<i>3.075.800.560</i>				

			Pengadaa n Barang Milik Daerah Penunjan g Urusan Pemerinta h Daerah														
			Sub KegiatanP engadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				75.800.560		75.800.560		75.800.560		75.800.560				
			Sub KegiatanP engadaan Gedung Kantor atau bangunan lainnya				3.000.000.000		2.000.000.000		-		3.000.000.000				
Mening katnya keseja hteraa n dan kualita s hidup masyar akat							446.531837.462		444.337242605		471.284.602.263		488.366.219.843	1.850.5 19.902. 173		Disnak er	

Batang seluruh nya melalui pengua tan daya saing daerah dan pertum buhan ekono mi yang inklusif dengan tetap mempe rhatika n konsep pemba nguna n berkela njutan																	
				PDRB per Kapita (ADHK)	21,1	21,7		22,3		22,9		23,49		25,49			
				Indeks Daya Saing	3,438	3,472		3,507		3,541		3,576		3,577			

				Daerah													
	Meningkatnya Sumber Daya Manusia Batang yang semakin berkualitas						260.011.575.959		259.252.872.746		261.808.151.752		263.437.570.423	1.044.510.170.880			
				Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	69,32	69,66		70		70,34		70,68					
				IPG	91,57	91,86		91,98		92,25		92,47					
				IDG	63,87	63,9		63,93		63,96		63,99					
			Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja														
				Rasio Penduduk yang bekerja	NA	70	1.066.676.000	72	916.676.000	74	916.676.000	76	966.676.000	3.866.704.000			
			<i>Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan</i>	<i>Jumlah pencari kerja yang mendapatkan</i>	<i>272</i>	<i>576</i>	<i>855.928.150</i>	<i>768</i>	<i>705.928.150</i>	<i>960</i>	<i>705.928.150</i>	<i>1152</i>	<i>705.928.150</i>				

			<i>Berdasarkan Unit Kompetensi</i>	<i>n pelatihan</i>													
			Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pelatihan	272	480	855.928.150	768	705.928.150	960	705.928.150	1152	705.928.150				
			<i>Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</i>	<i>Jumlah LPKS yang mendapatkan pembinaan</i>	<i>75</i>	<i>80</i>	<i>10.300.000</i>	<i>85</i>	<i>10.300.000</i>	<i>90</i>	<i>10.300.000</i>	<i>95</i>	<i>10.300.000</i>				
			Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga	Jumlah LPKS yang mendapatkan pembinaan	75	80	10.300.000	85	10.300.000	90	10.300.000	95	10.300.000				

			Pelatihan Kerja Swasta														
			Kegiatan Konsultan si Produktivi tas Kepada Perusahaa n Kecil	Jumlah Tenaga Kerja Mandiri/ Wirausaha Baru	40	80	200.447.850	100	200.447.850	120	200.447.850	140	200.447.850				
			Sub Kegiatan Pelaksana an Konsultasi Produktivi tas Kepada Perusahaa n Kecil				200.447.850		200.447.850		200.447.850		200.447.850				
	Meningk atnya kesejaht eraan masyara kat yang merata serta menurun nya angka						35.279.946.993		34.933.186.473		47.430.562.098		35.249.588.379	152.893 .283.94 3			

	kemiskinan dan pengangguran																
				Tingkat Pengangguran Terbuka	6,26	5,93		5,6		5,27		4,94					
			Program Penempatan Tenaga Kerja	Prosentase Pencari Kerja yang mendapat pekerjaan	0	31	144.800.500	36	144.800.500	41	144.800.500	46	144.800.500	579.202..000			
			<i>Kegiatan Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah Pencari Kerja yang Mendapat Pelayanan AK 1</i>	<i>5748</i>	<i>6323</i>	<i>144.800.500</i>	<i>6955</i>	<i>144.800.500</i>	<i>7651</i>	<i>144.800.500</i>	<i>8416</i>	<i>144.800.500</i>				
			Sub Kegiatan Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapat Pelayanan AK	5748	6323	144.800.500	6955	144.800.500	7651	144.800.500	8416	144.800.500				
			Program Hubungan Industrial	Penurunan Jumlah Perselisihan HI	0	14,8	191.361.750	14,6	191.361.750	144,4	191.361.750	14,2	191.361.750	765.447.000			
			Kegiatan	Jumlah PP	NA	16	92.417.950	17	92.417.950	18	92.417.950	19	92.417.950				

			Pengesahan Peraturan Perusahaan Bagi Perusahaan	yang disyahkan													
			Sub Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan Bagi Perusahaan	Jumlah PP yang disyahkan	NA	16	28.500.000	17	28.500.000	18	28.500.000	19	28.500.000				
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta	Jumlah Perusahaan yang memiliki sarana HI	NA	110	63.917.950	112	63.917.950	114	63.917.950	116	63.917.950				

			Pengupahan														
				Jumlah Tenaga Kerja yang ikut Program BPJS	NA	42,5		43		43,5		44					
			Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan Daerah Kabupaten/ Kota	Rasio jumlah perselisihan HI yang berhasil dilakukan mediasi	NA	100	98.943.800	100	98.943.800	100	98.943.800	100	98.943.800				
			Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial,	Rasio jumlah perselisihan HI yang berhasil dilakukan mediasi	NA	100	98.943.800	100	98.943.800	100	98.943.800	100	98.943.800				

			Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota														
			Program Perencanaan Tenaga Kerja				30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000				
				Persentase Kegiatan yang mengacu RTK	NA	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000				
			<i>Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro</i>	<i>Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>30.000.000</i>	<i>100</i>	<i>30.000.000</i>	<i>100</i>	<i>30.000.000</i>	<i>100</i>	<i>30.000.000</i>				

				<i>Tenaga Kerja</i>													
			Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	0	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000				
			Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase Transmigrasi yang berhasil ditempatkan	NA	100	42.000.000	100	42.000.000	100	42.000.000	100					
			<i>Kegiatan Penataan Pesebaran Penduduk yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah calon transmigran yang mendapat pelatihan</i>	<i>0</i>	<i>5</i>	<i>42.000.000</i>	<i>5</i>	<i>42.000.000</i>	<i>5</i>	<i>42.000.000</i>	<i>5</i>	<i>42.000.000</i>				
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Penataan	Jumlah calon transmigran yang mendapat	0	5	42.000.000	5	42.000.000	5	42.000.000	5	42.000.000				

			Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi	pelatihan													
--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan mengemukakan indicator kinerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Batang yang menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalm empat tahun mendatang, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan Rencana Pembangunan Daerah. Adapun penetapan indikator kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 7.1
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH TAHUN 2023-2026

No	Sasaran dan Indikator Sasaran Strategis	Kondisi Awal Kinerja	TARGET CAPAIAN TIAP TAHUN				Kondisi Akhir Kinerja
			2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Sasaran : Meningkatn ya kualitas Hubungan Industrial dan Kualitas Jaminan Sosial Tenaga Kerja						
	Indikator Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	29,4	30,37	31,17	32,01	32,8	32,8
2.	Sasaran : Meluasnya Kesempatan Kerja Bagi Masyarakat dan Meningkatn ya Kualitas						

	dan Produktivita s Tenaga Kerja						
	Indikator : Prosentase Pencari pekerjaan yang mendapat pekerjaan	96,63	97	97	97	97	97
3.	Sasaran : Meningkatn ya Pelayanan Publik yang Cerdas, Cepat dan Responsif						
	Indikator : Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target	60	70	80	80	80	80
	Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat OPD	84	85	85	90	90	90

BAB VIII PENUTUP

Rencana strategis Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2023-2026 ini disusun berdasarkan tahapan dan tata cara penyusunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Proses penyusunan Rencana Strategis sebagaimana dimaksud telah melalui tahapan penyusunan serta proses verifikasi untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan Perangkat Daerah dalam Rencana Strategis telah selaras dengan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Batang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023-2026.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis ini, akan dipergunakan untuk :

1. Pedoman bagi seluruh unit kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Batang dalam sasaran, strategi, kebijakan program dan kegiatan pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis;
2. Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perangkat daerah tahunan dan bahan penyusunan rancangan RKPD;
3. Pedoman dan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan serta sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja.

Apabila dikemudian hari Rencana Strategis ini terdapat ketidaksesuaian akibat perkembangan baik dari internal maupun eksternal, maka akan dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Batang, Juli 2022

Kepala Dinas Ketenagakerjaan

Kabupaten Batang



